

DIREKTORAT PERWILAYAHAN INDUSTRI

KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR LISTRIK YANG MENDUKUNG KAWASAN INDUSTRI PRIORITAS

Jakarta, 6 Februari 2020



Perkembangan Pembangunan Kawasan Industri

Jumlah Kawasan Industri Tahun 2014

No	Wilayah	Jumlah	Luas Kawasan Industri (Ha)	Persentase Luas (%)
1	Jawa	50	26,127.40	71.99
2	Sumatera	19	7,019.10	19.34
3	Sulawesi	2	2,203.00	6.07
4	Kalimantan	3	946.00	2.61
	Total	74	36,295.50	100.00



Jumlah Kawasan Industri Tahun 2019

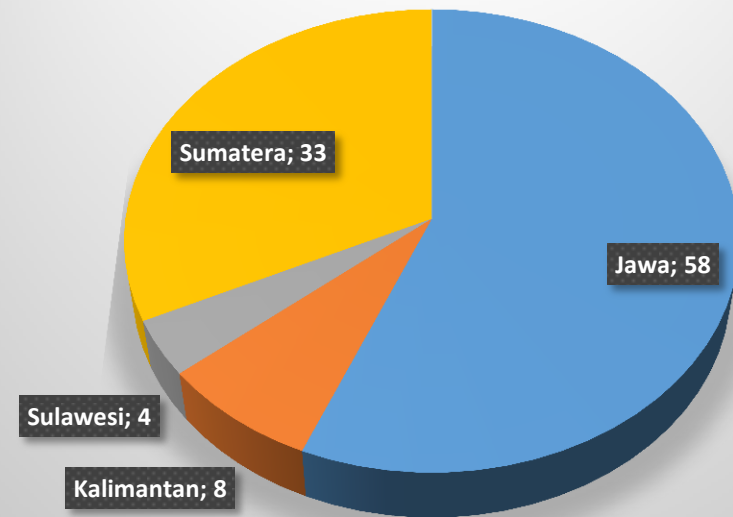
No	Pulau	Jumlah	Luas (Ha)	% Luas
1	Jawa	58	35.376,89	64%
2	Kalimantan	8	2.342,13	4%
3	Sulawesi	4	5.500,00	10%
4	Sumatera	33	11.962,40	22%
	Total	103	55.181,42	100,00%

Keterangan :

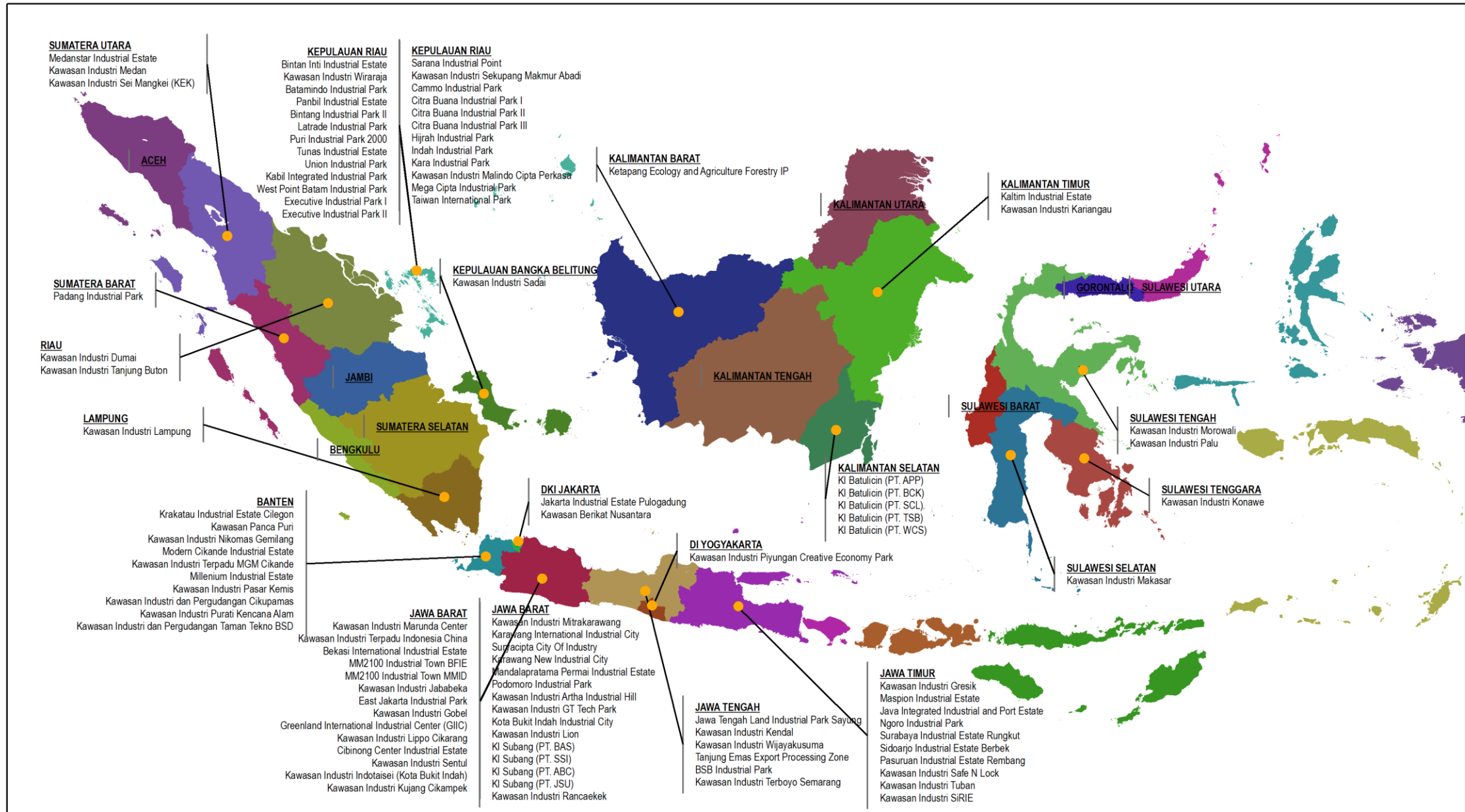
Terjadi peningkatan kawasan industri baik dari sisi jumlah maupun luasannya.

1. Dari sisi jumlah, terjadi peningkatan sebesar 28,15 persen,
2. Sementara dari sisi luas mengalami peningkatan 18.885,50 Ha atau sebesar 34.22 persen. Kawasan industri di luar Jawa mengalami peningkatan persentase luas dari 30 persen menjadi 36 persen pada tahun 2017
3. Meskipun dari sisi jumlah peningkatan masih banyak terjadi di Jawa, tetapi karena di luar Jawa ketersediaan lahan masih relatif luas maka peningkatan persentase luas kawasan di luar Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan di Jawa.

Jumlah Kawasan Industri, 2019



Persebaran Kawasan Industri Secara Nasional



PERSEBARAN KAWASAN INDUSTRI RPJMN 2020-2024

USULAN 27 KAWASAN INDUSTRI RPJMN 2020-2024

14 di Pulau Sumatera,
6 di Pulau Kalimantan,
1 di Pulau Madura,
1 di Pulau Jawa,
3 di Pulau Sulawesi dan Maluku,
1 di Pulau Papua
1 di Nusa Tenggara Barat

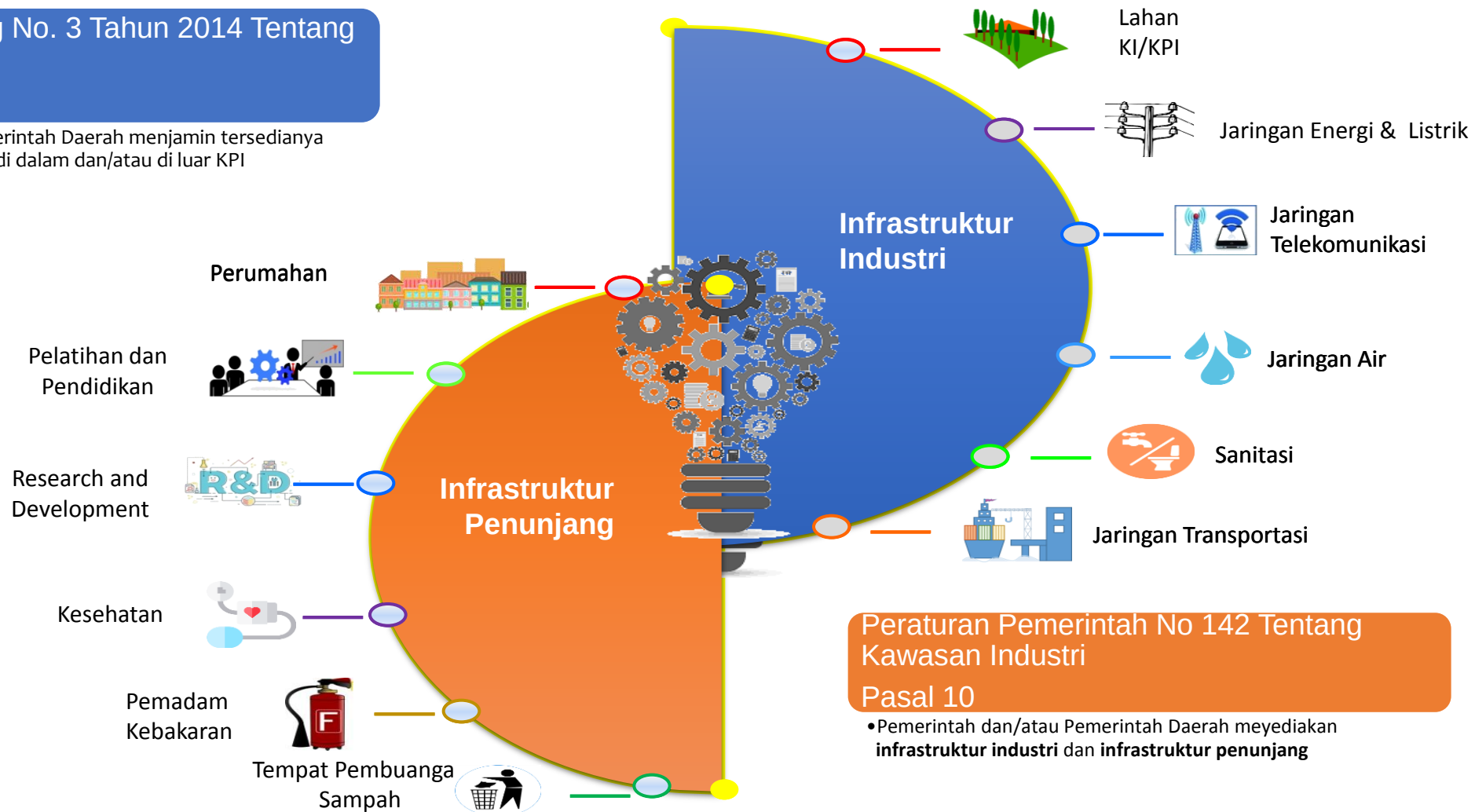


Infastruktur Industri DI DALAM WPPI & KPI

Undang Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

Pasal 62

- Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya Infrastruktur Industri di dalam dan/atau di luar KPI



Peraturan Pemerintah No 142 Tentang Kawasan Industri

Pasal 10

- Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan **infrastruktur industri** dan **infrastruktur penunjang**

Progress Pembangunan Kawasan Industri RPJMN 2020-2024

No	Nama Kawasan Industri	Lokasi Administrasi	IUKI	Kepemilikan Lahan
1	Teluk Weda	Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah Maluku Utara	IUKI non efektif - NIB nomor 8120315042745 Tanggal 24 Oktober 2018 - Izin Prinsip Kawasan Industri (1949/1/PI/PMA/2018 Tanggal 31 Mei 2018 dr BKPM Pusat) - Izin Lingkungan (502/1/DPMPTSP/I/2019, dr DPMPTSP Prov Maluku Utara) Tanggal 14 Januari 2019 - Izin Lokasi sedang proses Rekomendasi Pertek dari Kementerian ATR (Ditjen Penataan Agraria)	1. Lahan yang dikuasai : +/- 3000 ha 2. Lahan yang sudah sesuai RTRW : 536 Ha 3. Lahan yang sudah mendapatkan Pertek Izin Lokasi 640 Ha (oleh Kantah HalTeng)
2	Ketapang	Kec. Pagar Mentimun Kab. Ketapang Kalimantan Barat	IUKI non efektif - Izin lokasi : KBS (248/PEM/2013) luas 1000 Ha dan BAP (249/PEM/2013) luas 1150 ha - SK Kelayakan Lingkungan (109/BLHD/ 2014+110/BLHD/ 2014) - SK Izin Lingkungan (125/BLHD/2014+126/BLHD/2014) -Adendum 503/08/IL/DPMPTSP-C/2017 - IUKI Belum Efektif (OSS seluas 2.150 Ha)	- Pembebasan Lahan KBS : 1.000 Ha, 100% selesai (HGB baru pada 400 ha, sisanya sedang dalam proses pengajuan) - Pembebasan BAP : 1.150 ha, 100% selesai (100% sudah HGB) Izin lokasi sudah untuk total 2150 Ha dan tidak dibutuhkan revisi RTRW. Untuk perluasan KI lebih dari 2150 Ha belum mendapatkan izin. Untuk saat ini pengolahan limbah direncanakan di perluasan kawasan
3	Galang Batang	Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan Kepulauan Riau	PP KEK Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2017	telah dibebaskan lahan seluas 1750 Ha dari target 2333.6 Ha, dan telah diterbitkan HGB KEK Galang Batang seluas 185,1 Ha serta telah dilakukan pematangan lahan seluas 340 Ha
4	Surya Borneo	Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah	- IUKI, Izin Lokasi, Izin Lingkungan	Dikuasai seluas 96 Ha dengan status HGB
5	Sadai	Kec. Tukak Sadai Kab. Bangka Selatan Bangka Belitung	- IUKI, Izin Lokasi, Izin Lingkungan	Kepemilikan Lahan 400 Ha, sudah sertifikat HGB seluas 176 Ha
6	Tanjung Enim	Kec. Tanjung Enim Kab. Muara Enim Sumatera Selatan	Sedang proses Izin Lokasi dan AMDAL	Luas rencana lahan sebesar 585 Ha, baru 357.95 ha yang dibebaskan dan dimiliki oleh PTBA
7	Batulicin	Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan	- IUKI, izin Lokasi, Izin Lingkungan	Dikuasai seluas 1700 Ha
8	Bintan Aerospace	Kec. Kuala Lobam Kab. Bintan Kepulauan Riau	Sedang Proses Izin Perluasan dari KI Bintan Inti - IUT, IU FTZ, Izin Lokasi, Sertifikat OVNI, Tersus, Izin Lingkungan, - Fasilitas KLIK, KP no. 144 thn 2018 ttg Penetapan Lokasi Bandar Udara Baru; KP no. 1148 thn 2018 ttg Ijin Mendirikan Bangunan Bandar Udara	Luas lahan yang dikuasain 4.000 ha, Luas Bandara 800 ha, Luas Kawasan Terpadu Industri Dirgantara 500 ha, sisanya lahan PT. BIIE
9	Jorong	Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Kalimantan Selatan	Dalam proses penyusunan Amdal	Lahan yang sudah dikuasai 320 ha, yang sudah clean and cleaar 158 ha.6 ha dihibahkan untuk pelabuhan Swarangan dan 4,6 ha dihibahkan untuk akses jalan amsuk ke pelabuhan Swarangan

Progress Pembangunan Kawasan Industri RPJMN 2020-2024



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA



No	Nama Kawasan Industri	Lokasi Administrasi	IUKI	Kepemilikan Lahan
11	Kuala Tanjung	Kec. Sei Suka Kab. Batubara Sumatera Utara	- Izin Lokasi (seluas 400 ha) - Izin Lingkungan (AMDAL) dalam Proses	dari rencana 3400 Ha, saat ini hanya 150 Ha yang sudah dibebaskan dengan status SHM dan tidak dalam satu hamparan. Sedang memohon Penetapan Lokasi kepada Pemprov Sumut.
12	Sei Mangkei	Kec. Bosar Malingas Kab. Simalungun Sumatera Utara	- IUKI - Izin Lingkungan - Izin Lokasi	Dikuasai +/- 6000 ha dengan lahan yang memiliki sertifikat HGB seluas 1968 ha
13	Kemingking	Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi Jambi	Memiliki : 1. Surat Rekomendasi dari 7 Kades & 2 Camat 2. Surat Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang dari BKPRD 3. Surat Rekomendasi dari Kemenperin 4. Andalalin 5. Izin Prinsip 6. OSS (Izin Operasional non efektif, Izin Lingkungan non efektif, Izin Usaha non efektif, Izin Lokasi non efektif)	100% Lahan telah dikuasai seluas 2020 ha
14	Teluk Bintuni	Desa Onar Distrik Sumuri Kab. Teluk Bintuni Papua Barat	Izin Belum Ada	Dalam proses pembebasan lahan seluas 50 ha oleh Pemkab Teluk Bintuni
15	Palu	Desa Baiya Kec. Palu Kota Palu Sulawesi Tengah	- IUKI - Izin Lokasi - Izin Lingkungan	Telah menguasai 103 Ha. Lahan yang sudah memiliki HPL/HGB seluas 68 ha
16	Bangkalan	Desa Mrandung Kec. Klampis Kab. Bangkalan Jawa Timur	Belum	Rencana pembebasan oleh BPWS seluas 476 Ha tahun 2020-2024
17	Tanggamus	Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus Lampung	Proses	HPL Pertamina 800 ha
18	Tenayan	Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Riau	Lengkap (IUKI Desember 2019)	Tahap 1: 266 Ha (HPL), total rencana 2253 ha
19	Brebes	Kec. Bulukamba, Tanjung dan Losari Kab. Brebes Jawa Tengah	1. Proses Revisi RTRW 2. Proses penetapan Lokasi di Prov Jateng	n/a
20	Tanjung Buton	Kec. Mengkapan Kab. Siak Riau	IUKI untuk 57 ha	Lahan sudah dikuasai Pemkab Siak seluas 5500 ha, namun HPL baru seluas 600 Ha

Progress Pembangunan Kawasan Industri RPJMN 2020-2024

No	Nama Kawasan Industri	Lokasi Administrasi	IUKI	Kepemilikan Lahan
21	Way Pisang	Kec. Way Pisang Kab. Lampung Selatan Lampung	Belum	Proses konversi hutan produksi pada Tahap I (seluas 500 ha) dari keseluruhan rencana 3000 ha
22	Katibung	Desa Tanjungan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan Lampung	Belum	n/a
23	Pesawaran	Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran Lampung	Belum	n/a
24	Ladong	Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar Aceh	Proses (sudah BAP IUKI pada November 2019) Pemerintah Prov Aceh sudah memiliki HPL seluas 56 Ha	
25	Batanjung	Kec. Kapuas Kuala Kab. Kapuas Kalimantan Tengah	Belum	Pemkab Kapuas telah membebaskan lahan seluas ± 1000 ha untuk Pelabuhan Batanjung dan Kawasan Industri pendukungnya
26	Takalar	Kec. Mangarabombang Kab. Takalar Sulawesi Selatan	1. Proses pengajuan Izin Lokasi di Provinsi Sulsel 2. Proses penyusunan dokumen AMDAL	Sedang dalam proses pembebasan lahan tahap I oleh Pemkab Takalar dan KBN seluas 300 ha
27	Sumbawa Barat	Kec. Sekongkang Kab. Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat	Belum	PT. Amman sudah menguasai lahan seluas 350 Ha dari rencana 850 Ha

Progress Pembangunan Kawasan Industri PSN di luar RPJMN

No.	Profil Kawasan Industri		Lahan		Perizinan	Timeframe Pembangunan Kawasan
	Kawasan Industri	Lokasi	Total Rencana	Pembebasan	IUKI	
1	KI Landak	Kab. Landak, Kalimantan Barat	KIM 91,90 KIM II 253.6539	- Pembebasan Lahan KIM I seluas 91.90 Ha dilaksanakan pada tahun 2011 - Pembebasan Lahan KIM II seluas 253.6539 Ha dilaksanakan pada tahun 2012		2020 akan dibangun embung 2020 iuki efektif. Minggu 2 bulan november 2019 akan KPBU pembangunan infrastruktur BKPM akan memfasilitasi Promosi investasi. Cat: 2017-2022 KIM masuk dalam RPJMD
2	Dumai	Kel. Pelintung, Kec. Medang Kampai, Kota Dumai, Riau	1785,67 Ha	1785,67 Ha	Sudah memiliki Izin Lokasi seluas 1785,67 Ha	
3	Morowali	Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Sulawesi Tengah	3000 Ha	2000 Ha	Belum efektif	



Progress Pembangunan Kawasan Industri PSN di luar RPJMN

No	Kawasan Industri	Lokasi	Luas Lahan Rencana	Lahan Realisasi	IUKI	Timeframe pembangunan kawasan
4	Konawe	Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara	2253 Ha	1670 Ha	Belum efektif	
5	KAWASAN INDUSTRI BANTAENG / KIBA	Kab. Bantaeng, Sulawesi Selatan	3128 Ha	238 Ha, saat ini sudah ada tanah yg satu hamparan 47.9 yang sudah selesai dan masih kurang untuk satu hamparan 50 ha untuk pengajuan dan dilakukan oleh pt huad	Belum efektif	- Perda penyertaan modal nomor 10 tahun 2019 - Perda pendirian perseroda untuk pengelol nomor 2 tahun 2019 - Perda RPIK nomor 6 tahun 2019 - RDTR menunggu persub
6	Bitung	Kec. Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara	534 Ha	92,79 Ha (2017)	-	
7	Buli	Kec. Bulu, Kab. Halmahera Timur, Maluku Utara	900 Ha		-	
8	Wilmar Serang	Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Banten	800 Ha	846 Ha (satu hamparan)	Efektif	Support pendanaan 1 Triliun, Pemda Pemprov untuk memperbaiki kondisi jalan



Progress Pembangunan Kawasan Industri PSN di luar RPJMN

No	Kawasa Industri	Lokasi	Lahan Rencana	Lahan Realisasi	IUKI	Timeframe Pembangunan Kawasan
9	JIIPE	Jl. Raya Manyar KM 11 Kec. Manyar, Gresik, Jawa Timur	1.761 Ha	1.150 Ha	Efektif	15 tahun
10	Kendal Indsutrial Park	Kec. Brangsong, Kab. Kendal, Jawa Tengah	2200 Ha (Phase I : 1000 Ha dan Phase II : 1200 Ha)	734.9 Ha	Efektif	1. Pelabuhan Kendal atau Tj emas West Port (start 2019 - finish 2023) 2. Percepatan Pembangunan Bendung Karet Sungai Blorong (Start 2018 - Finish 2020) 3. Percepatan Pembangunan Gardu Induk PLN 150 KV di dalam KI Kendal (start 2020 - finish 2021) 4. Percepatan Pembangunan Harbour Toll Road Semarang Kendal (start 2020 - finish 2023) 5. Percepatan Pembangunan PIPA GAS Semarang - KI Kendal & Kepastian Suplai GAS (start 2020 - finish 2020) 6. Pembangunan Waduk Bodri (start 2019 - finish 2024) 7. Akses Kereta Api menuju Pelabuhan Kendal (start 2021 - finish 2023) 8. Peningkatan Jalan Pelabuhan dan drainase Jalan Pelabuhan (start 2020 - finish 2021) 9. Pembangunan tanggul/Breaker Pencegah ABRASI (start 2020 - finish 2022) 10. PEMBEBASAN LAHAN KIK 1000 HA, Kekurangan 25 % diharapkan selesai tahun 2023.USULAN terapkan UU no 2/2014 dan Perpres 148/2015 untuk sisa tanah yang belum bebas; bilamana PSN Non Pemerintah pembebasannya sudah lebih 60 % dan sudah ada aktivitas pembangunan dan investasi 11. Pembangunan Infrstruktur di dalam KI Kendal untuk 1000 HA akan selesai di tahun 2027
11	Arun	Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh	324,4 Ha	324,4 Ha	Belum efektif	1. PT.Patriot selaku BUPP KEK dalam proses menyediakan utilitas listrik sebesar 50 MW (PLTMG) dan secara bertahap ditingkatkan hingga 350 MW
12	Tanjung Api-Api	Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan	2030 Ha	67 Ha	Belum efektif	1. Sudah terdapat bangunan kantor pengelola 2. terdapat pelabuhan penyebrangan diluar kawasan yang sudah dibebaskan namun masuk ke dalam masterplan
13	MBTK	Jalan Internasional Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan, Desa Kaliorang, Kec. Kaliorang, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur	557,34 Ha (PP 85 tahun 2014)	510,34 Ha	Efektif	1. PD MBS dan Pemkab Kutai timur telah membentuk PT KKIM sebagai pengelola KI MBTK dan PT KPIM sebagai pengelola pelabuhan internasional Maloy 2. Telah dibangun infrastruktur seperti gedung perkantoran, workshop, rumah ibadah, gedung PMK, helipad, menara telekomunikasi, 3. Penyelesaian pembangunan Pelabuhan dari Kementerian Perhubungan dan telah terbangun SPAM dengan kapasitas 200 L/Detik beserta booster dan jaringan pemipaan sepanjang 13,9 KM
14	Sorong	Distrik Arar, Kab. Sorong, Papua Barat	523,7 Ha	198,5 Ha	-	1. Saat ini telah tersedia PLTMG 50 MW milik PLN dan PLTMG Jeflio 15 MW (di luar KEK)

Kebutuhan Infrastruktur Listrik di Kawasan Industri RPJMN dan PSN

No	Kawasan Industri	Supply Energi Listrik Eksisting	Kebutuhan Energi Listrik	Keterangan	Isu
1	KI Teluk Weda		Kebutuhan listrik berkapasitas ±600 MW*	RPJMN	
2	Kawasan Industri Ketapang		Supply listrik dari PLN berkapasitas 87.068,25 MW	RPJMN dan PSN	
3	KI Galang Batang	Sedang membangun pembangkit 6x25 MW untuk konstruksi dan refinery, dilanjutkan 8x150 MW dan 10x150 MW	Kebutuhan listrik berkapasitas ±350 MW	RPJMN	
4	KI Surya Borneo	Power Plant Turbine 2 x 7.5 MW		RPJMN	
5	KI Sadai	Sudah MoU dengan PLN untuk pengadaan listrik dan GI dalam kawasan. Sudah menyediakan 4 Ha untuk PLTBM dalam kawasan berkapasitas 65 MVA Bio Massa	kebutuhan listrik 112 MW	RPJMN	
6	KI Tanjung Enim	Akan dipenuhi oleh rencana PLTU Sumsel 8 berkapasitas 2x620 MW		RPJMN	
7	Kawasan Industri Batulicin	- PLN baru berkomitmen akan memenuhi 50 MW, dan ada Coal Power Plant 3,5 MW dan 6 MW Rencana PLTU kapasitas 2 x 100 MW	Kebutuhan listrik berkapasitas 633 MW	RPJMN dan PSN	
8	Bintan Aerospace	- Power Plant 21 MW + 2 x 15 MW coal fired Under Construction dan Gardu Induk dengan Kapasitas: 10.3 MW jenis PLTD dan kerjasama dengan PLN untuk supply listrik		RPJMN	Mengharapkan keandalan supply listrik namun ada permasalahan pembebasan okasi usaha pembangkit
9	KI Jorong	PLTU Asam-Asam eksisting 2 x 100 MW untuk ekspansi menjadi 4 x 100 MW	Kebutuhan Total Energi Listrik 200 MW. Terdapat PLTU Asam – asam dengan kapasitas 460 MW di dekat KI Jorong.	RPJMN dan PSN	
10	Kawasan Industri Tanah Kuning		Kebutuhan Listrik dari PLTA Sungai Kayan sebesar 1000 MW	RPJMN dan PSN	
11	Kawasan Industri Kuala Tanjung		Kebutuhan pembangunan pembangkit listrik PLTG/PLTB ± 300 MW, dan untuk liquid industry sebesar 5 MW	RPJMN dan PSN	
12	KEK Sei Mangkei	- PLTG 250 MW serta Trafo daya Gardu Induk khusus untuk KEK Sei Mangkei (tidak dipergunakan untuk umum)	Kebutuhan listrik berkapasitas 500 MW sampai dengan tahun 2025	RPJMN dan PSN	
13	Kawasan Industri Kemingking	1. Power Plant 2 x 100 MW dan Sudah ada MoU dengan PLN dan untuk 35 MW dapat dinyalakan dalam waktu 75 hari	Kebutuhan power plant berkapasitas 2x100 MW	RPJMN	
14	Kawasan Industri Teluk Bintuni	Gardu Listrik berkapasitas '2.000 KW *)	Kebutuhan listrik berkapasitas 25 MW	RPJMN dan PSN	
15	KEK Palu		kebutuhan listrik 240 MW	RPJMN dan PSN	
16	Kawasan Industri Bangkalan (KKJSM)		Pembangunan PLTGU di Pulau Madura engan kapasitas 450 MW	RPJMN	
17	KI Tanggamus	'150 kv (dibangun 2016)		RPJMN dan PSN	
18	KI Tenayan	PLTU 2 x 110 MW (Operasional) di samping lokasi KI; - PLTGU 27 MW sedang konstruksi		RPJMN	
19	KI Brebes	- Gardu Induk Tanjung (Konstruksi) dan ada Rencana jaringan transmisi SUTET (500 kV dan SUTT (150 kv)		RPJMN	
20	Kawasan Industri Tanjung Buton		Kebutuhan listrik kapasitas 120 MW	RPJMN dan PSN	
21	KI Way Pisang		kebutuhan listrik kurang lebih 150 MW*	RPJMN	
22	KI Katibung			RPJMN	
23	KI Pesawaran			RPJMN	
24	KI Ladong		kebutuhan listrik kurang lebih 10 MW*	RPJMN	
25	KI Batanjung		kebutuhan listrik kurang lebih 200 MW*	RPJMN	
26	KI Takalar		kebutuhan listrik kurang lebih 60 MW*	RPJMN	

Keterangan:
* : estimasi berdasarkan Permenperin No 40 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri

Kebutuhan Infrastruktur Listrik di Kawasan Industri PSN (diluar RPJMN 2020-2024)

No	Kawasan Industri	Supply Energi Listrik Eksisting	Kebutuhan Energi Listrik
1	Kawasan Industri Dumai		Kebutuhan listrik berkapasitas 600 MW
2	Kawasan Industri Konawe		Kebutuhan listrik berkapasitas 2,4 GW untuk operasional VDNI dan OSS
3	Kawasan Industri Bantaeng	Sudah ada jaringan listrik PLN dengan kapasitas 40 MW dengan 80 MW dengan rencana 500 MW oleh PLN	Kebutuhan listrik berkapasitas 200-300 MW
4	KEK Bitung		Kebutuhan listrik berkapasitas 100 MW
5	Kawasan Industri Wilmar Serang	ada, PLN, lokasinya gardu induk di dalam kawasan industri dengan kapasitas 20 MW	500 MW untuk 10 tahun kedepan
6	Kawasan Industri JIPE		Kebutuhan listrik berkapasitas 15 MW
7	KI Kendal		Kebutuhan listrik berkapasitas 100 MW
8	KEK Arun Lhokseumawe		Kebutuhan listrik berkapasitas 350 MW
9	Ki Tanjung Api Api	Tersedia gardu induk kapasitas 60 MW di kawasan yang memenuhi kebutuhan tahap I	Kebutuhan listrik berkapasitas 753,87 MW
10	KI MBTK	Ada (PLN 1 MW Eksisting)	Kebutuhan listrik berkapasitas 144 MW* (berdasar masterplan)
11	KI Sorong		Kebutuhan listrik berkapasitas 344,8 MW
12	KI Landak	Sudah ada koordinasi antara PT. Landak Barajaki dengan pihak PLN akan membangun gardu induk jika terdapat investor	
13	KI Morowali	- Sudah ada PLTU berkapasitas 1830	
14	Buli	n/a	n/a

*Keterangan:
* : estimasi
berdasarkan
Permenperin No
40 tahun 2016
tentang Pedoman
Teknis Kawasan
Industri*

